

---

## ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2019-2023

Winy Aditya Dewi Suratno<sup>1</sup>; Sri Isnowati<sup>2</sup>

Universitas Stikubank, Semarang<sup>1,2</sup>

Email : winnyaditya74@gmail.com<sup>1</sup>; isnowati@edu.unisbank.ac.id<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh rasio efektivitas PAD, efisiensi, kemandirian, dan pertumbuhan PAD terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun anggaran 2019–2023. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik *purposive sampling* terhadap 35 daerah. Data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran dianalisis menggunakan analisis rasio keuangan dan regresi data panel, meliputi Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier, serta regresi linear berganda yang dilengkapi dengan Uji t, Uji F, dan koefisien determinasi ( $R^2$ ). Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas dan efisiensi PAD tergolong baik, sedangkan rasio kemandirian masih rendah dengan pola instruktif. Rasio pertumbuhan PAD mengalami peningkatan selama periode observasi. Model *Random Effect* dipilih sebagai model terbaik, dan keempat rasio terbukti berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, baik secara parsial maupun simultan. Temuan ini mengindikasikan perlunya peningkatan kualitas pengelolaan PAD untuk memperkuat kemandirian fiskal, meningkatkan pelayanan publik, dan mendorong daya saing daerah secara berkelanjutan.

Kata Kunci : Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah; Efektivitas PAD; Efisiensi; Kemandirian Keuangan Daerah; Pertumbuhan PAD

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the influence of the effectiveness ratio of Local Own-Source Revenue (PAD), efficiency, fiscal independence, and PAD growth on the financial performance of regency and city governments in Central Java Province during the 2019–2023 fiscal years. A quantitative approach was employed using purposive sampling across 35 local governments. Secondary data were obtained from Budget Realization Reports (LRA) and analyzed using financial ratio analysis and panel data regression, including Chow Test, Hausman Test, and Lagrange Multiplier Test, as well as multiple linear regression with t-test, F-test, and coefficient of determination ( $R^2$ ). The results indicate that PAD effectiveness and efficiency are in good categories, while fiscal independence remains low, following an instructive pattern. The PAD growth ratio showed a positive trend over the study period. The Random Effect Model was selected as the most appropriate model, with all four ratios having a significant impact—both partially and simultaneously—on financial performance. These findings highlight the importance of strengthening PAD management to enhance fiscal capacity, improve public service delivery, and foster regional competitiveness in a sustainable manner.*

*Keywords : Local Government Financial Performance; PAD Effectiveness; Efficiency; Regional Financial Independence; PAD Growth*

## PENDAHULUAN

Pemerintah daerah memperoleh hak dan kewenangan untuk mengatur serta mengelola keuangan secara mandiri sebagai konsekuensi dari pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, serta pelayanan publik dilaksanakanlah otonomi daerah. Otonomi daerah dimaksudkan untuk mengoptimalkan pendapatan yang dihasilkan oleh daerah agar daerah tersebut dapat berkembang berdasarkan kemampuan yang dimiliki serta mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat (Jaeni & Anggana L, 2016). Dalam pelaksanaannya, pengelolaan keuangan daerah menjadi krusial karena mencerminkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Langkah strategis yang bisa ditempuh pemerintah daerah guna mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang lebih luas, nyata, serta penuh tanggung jawab, termasuk dalam kerangka desentralisasi fiskal menjadi upaya peningkatan pengelola keuangan daerah beserta kinerja fiskalnya (Ningsih dkk., 2023). Kinerja keuangan dapat dinilai melalui analisis rasio keuangan APBD (Nurhayati, 2015). Analisis rasio keuangan yang bisa digunakan seperti rasio efektivitas PAD, efisiensi, kemandirian, dan pertumbuhan PAD, yang menggambarkan seberapa baik daerah dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya fiskalnya (Halim, 2012).

Meskipun laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah dalam rentang 2019–2023 umumnya berhasil memperoleh opini WTP dari BPK, fakta di lapangan menunjukkan masih terdapat kendala seperti pendapatan daerah yang belum dikelola secara maksimal, aset tetap yang dimanfaatkan pihak lain tanpa dukungan kontrak tertulis, serta temuan pembayaran yang melebihi nilai seharusnya pada beberapa paket kegiatan (Mushonifin, 2021). Permasalahan ini menunjukkan bahwa opini WTP belum mencerminkan sepenuhnya kualitas pengelolaan keuangan daerah. Maka, evaluasi kinerja keuangan secara kuantitatif penting untuk mengukur efektivitas implementasi kebijakan fiskal di daerah.

Kajian-kajian sebelumnya yang menyoroti pendekatan rasio keuangan dalam analisis kinerja keuangan pemerintah daerah telah banyak dilakukan oleh para peneliti, namun hasil yang diperoleh menunjukkan variasi temuan. Beberapa penelitian (Amal & Wibowo, 2022; Berizky & Kurniawan, 2024; Harahap, 2021; Hidayah & Witono, 2021;

Isnowati & Masdjojo, 2024; Perangin-Angin dkk., 2023; Setianingrum & Haryanto, 2020; Wellyan dkk., 2023; Widiyanto & Isnowati, 2023; Yanuar, 2023) menunjukkan bahwa rasio efektivitas PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, sementara pada penelitian lainnya (Armiyani dkk., 2022) menunjukkan pengaruh negatif. Ketidakkonsistenan juga ditemukan pada rasio efisiensi dengan beberapa penelitian menunjukkan pengaruh positif (Harahap, 2021; Wellyan dkk., 2023; Widiyanto & Isnowati, 2023), sedangkan lainnya menunjukkan pengaruh negatif (Amal & Wibowo, 2022; Berizky & Kurniawan, 2024; Perangin-Angin dkk., 2023; Yanuar, 2023). Demikian pula, pengaruh rasio kemandirian terhadap kinerja keuangan juga belum menunjukkan hasil yang seragam; beberapa penelitian menemukan pengaruh positif (Amal & Wibowo, 2022; Berizky & Kurniawan, 2024; Harahap, 2021; Wellyan dkk., 2023; Widiyanto & Isnowati, 2023), sementara lainnya menunjukkan pengaruh negatif (Hidayah & Witono, 2021; Isnowati & Masdjojo, 2024; Perangin-Angin dkk., 2023; Setianingrum & Haryanto, 2020; Yanuar, 2023). Ketidakkonsistenan juga terlihat pada rasio pertumbuhan PAD dengan adanya penelitian terdahulu (Setianingrum & Haryanto, 2020) yang menunjukkan pengaruh positif, sementara penelitian lainnya (Amal & Wibowo, 2022; Isnowati & Masdjojo, 2024; Perangin-Angin dkk., 2023) menunjukkan pengaruh negatif. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan adanya *research gap* yang relevan untuk diteliti lebih lanjut dalam mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap determinan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini difokuskan pada 35 kabupaten dan kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi, rasio kemandirian, serta rasio pertumbuhan PAD memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Pemilihan variabel-variabel tersebut bukan tanpa alasan, mengingat keempatnya merupakan indikator utama dalam penilaian sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola sumber-sumber keuangannya secara optimal. Studi ini muncul sebagai respons atas temuan-temuan sebelumnya yang menunjukkan hasil yang saling bertolak belakang terkait pengaruh masing-masing rasio tersebut terhadap kualitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan menggunakan data dari Laporan Realisasi Anggaran selama periode 2019 hingga 2023, penelitian ini tidak hanya bertujuan memberikan bukti empiris yang lebih komprehensif, tetapi juga

diharapkan dapat menjadi rujukan dalam rumusan kebijakan fiskal daerah yang lebih akuntabel, transparan, dan kompetitif di tengah dinamika pembangunan daerah saat ini.

## TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### **Teori *Stewardship***

Teori *stewardship* merupakan perluasan dari teori agensi yang menekankan bahwa pencapaian hasil utama organisasi diprioritaskan untuk mendukung kepentingan organisasi secara keseluruhan, bukan semata-mata untuk memenuhi tujuan pribadi dari pihak manajemen (Donaldson & Davis, 1991). Implementasi teori *stewardship* berperan dalam memperkuat tanggung jawab manajemen kepada pemegang saham dan pihak berkepentingan lainnya, serta mendorong terciptanya tata kelola perusahaan yang efisien dan berorientasi pada keberlanjutan (Arifin & Faisal, 2016).

Pemerintah yang telah diberikan kepercayaan oleh masyarakat menunjukkan komitmennya dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih melalui peningkatan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah (Cristiana & Maryono, 2016). Teori *stewardship* di dalam lingkup pemerintah daerah dapat menjelaskan bahwa kepercayaan terhadap lembaga pemerintah daerah dapat dibangun melalui pelaksanaan tugas dan fungsi yang sesuai dengan peran institusionalnya, dengan berorientasi pada kepentingan publik dan pengelolaan keuangan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan menjadi landasan penting dalam upaya mencapai tujuan utama berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat (Ernawati & Jaeni, 2018).

### **Keuangan Daerah**

UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah menegaskan bahwa keuangan daerah merupakan representasi dari kewajiban dan hak pemerintah daerah ketika melaksanakan pemerintahan, yang dinilai secara moneter dan termasuk di dalamnya aset milik daerah.

Pemerintah daerah memiliki hak berupa kewenangan untuk mengelola berbagai jenis pajak daerah, sementara kewajiban mencakup pengalokasian belanja guna membiayai urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. Kewenangan dan tanggung jawab tersebut merupakan konsekuensi dari pendelegasian urusan pemerintahan. Sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 1 Tahun 2022, keuangan daerah memiliki ruang lingkup yang meliputi berbagai aspek yang saling terkait. Hal ini

mencakup hak daerah dalam menetapkan dan memungut pajak serta retribusi, termasuk kewenangan untuk melakukan pinjaman guna pembiayaan pembangunan. Selain itu, daerah juga memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan memenuhi pembayaran terhadap kewajiban pihak ketiga. Keuangan daerah juga mencakup seluruh pendapatan yang menjadi hak daerah, serta pengeluaran yang menjadi beban tanggung jawabnya. Di dalamnya termasuk pula kekayaan daerah, baik yang dikelola secara langsung maupun melalui pihak lain, seperti kas, surat berharga, piutang, aset barang, dan hak-hak ekonomi lainnya, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan. Tak hanya itu, aset milik pihak lainnya yang berada dalam penguasaan pemerintah daerah juga termasuk yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan fungsi pemerintahan.

### **Kinerja Keuangan Daerah**

Kinerja keuangan daerah menjadi tolok ukur yang dipakai untuk mengevaluasi seberapa efektif pengelolaan anggaran dalam mendukung prinsip akuntabilitas publik. Menurut Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, kinerja keuangan daerah mencerminkan *output* dari pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan dana, yang dinilai berdasarkan capaian kuantitatif dan kualitatif secara terukur serta kapasitas daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat diukur melalui tingkat efisiensi.

Kinerja keuangan daerah berfungsi sebagai instrumen evaluatif untuk menilai tingkat kemampuan suatu pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kewenangan otonomi yang dimilikinya, yang biasanya diukur melalui berbagai indikator rasio keuangan (Halim, 2012).

### **Rasio Keuangan Daerah**

Mengacu pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, evaluasi kinerja harus memperhatikan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi, dan efektivitas di setiap program maupun sub kegiatan. Analisis rasio keuangan dipergunakan sebagai sarana untuk mengukur sejauh mana kinerja keuangan pemerintah daerah tercapai. Rasio keuangan daerah yang dipakai untuk menganalisis kinerja keuangan terdiri dari rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi, rasio kemandirian, dan rasio pertumbuhan PAD.

1. Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) digunakan untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari sumber-sumber pendapatan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan perencanaan target sebelumnya, sehingga mencerminkan tingkat keberhasilan dalam mengelola potensi pendapatan daerah (Halim, 2012).
2. Rasio efisiensi mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah mampu menggunakan anggaran secara optimal untuk menghasilkan pendapatan daerah (Halim, 2012).
3. Rasio kemandirian mencerminkan kapasitas fiskal pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan kegiatan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta pemberian layanan kepada publik dengan ketergantungan yang rendah terhadap transfer dari pusat (Halim, 2012). Rasio ini mencerminkan pola hubungan dengan pemerintah pusat yang dapat bersifat instruktif, konsultatif, partisipatif, atau delegatif.
4. Rasio pertumbuhan PAD menunjukkan perubahan PAD dari tahun sebelumnya ke tahun berjalan, yang tercermin pada laporan realisasi anggaran (Halim, 2012). Untuk menilai dinamika penurunan maupun peningkatan pendapatan daerah, maka digunakan rasio tersebut.

### **Pengembangan Hipotesis**

#### **Pengaruh Rasio Efektivitas PAD terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Rasio efektivitas PAD merepresentasikan kemampuan sejauh mana pemerintah daerah dapat mengelola dan merealisasikan penerimaan dari sumber-sumber PAD sesuai proyeksi yang telah ditentukan sebelumnya (Mahmudi, 2019). Penelitian yang telah dilakukan (Setianingrum & Haryanto, 2020; Widiyanto & Isnowati, 2023) terdapat hubungan positif antara rasio efektivitas pendapatan daerah dengan kinerja keuangan pemerintah daerah. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa semakin optimal realisasi PAD terhadap target yang ditetapkan, maka semakin baik pula capaian kinerja keuangan daerah secara keseluruhan. Hipotesis pertama berdasarkan hasil penelitian tersebut sebagai berikut :

H<sub>1</sub>: Rasio efektivitas PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah

#### **Pengaruh Rasio Efisiensi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Rasio efisiensi menggambarkan sejauh mana pemerintah daerah mampu mengendalikan besarnya pengeluaran dalam upaya pengumpulan pendapatan, dengan

cara membandingkan total biaya yang digunakan terhadap jumlah pendapatan yang berhasil direalisasikan (Halim, 2012). Penelitian yang telah dilakukan (Harahap, 2021; Wellyan dkk., 2023; Widiyanto & Isnowati, 2023) menunjukkan bahwa rasio efisiensi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Hal tersebut menandakan adanya efisiensi daerah untuk memaksimalkan pengelolaan anggaran dan potensi penerimaan yang ada di daerah tersebut serta mampu melayani masyarakat dengan optimal. Hipotesis kedua berdasarkan hasil penelitian tersebut sebagai berikut :

H<sub>2</sub>: Rasio efisiensi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah

### **Pengaruh Rasio Kemandirian terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Rasio kemandirian keuangan daerah merefleksikan kemampuan fiskal suatu pemerintah daerah guna mendanai seluruh aktivitas pemerintahan tanpa bergantung secara signifikan pada transfer dari pemerintah pusat. Penelitian yang dilakukan (Berizky & Kurniawan, 2024; Widiyanto & Isnowati, 2023) menunjukkan rasio kemandirian memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah, sehingga tinggi dan rendahnya tingkat rasio kemandirian pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Hipotesis ketiga berdasarkan hasil penelitian tersebut sebagai berikut :

H<sub>3</sub>: Rasio kemandirian berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah

### **Pengaruh Rasio Pertumbuhan PAD terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Rasio pertumbuhan PAD merefleksikan dinamika perubahan yang terjadi pada penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah dari waktu ke waktu (Halim, 2012). Penelitian sebelumnya (Setianingrum & Haryanto, 2020) mengungkapkan bahwa pertumbuhan rasio pendapatan dan belanja daerah memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa pertumbuhan fiskal yang positif dapat mendorong perbaikan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Hipotesis keempat berdasarkan hasil penelitian tersebut sebagai berikut :

H<sub>4</sub>: Rasio pertumbuhan PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder berupa 35 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019—2023. Data tersebut disusun menjadi data panel (gabungan dari data *time series* dan *cross section*), yang dapat diartikan data yang terdiri dari beberapa objek dan beberapa periode (Kusumaningtyas dkk., 2022). Metode analisis data dilakukan dengan menghitung rasio efektivitas PAD, efisiensi, kemandirian, dan pertumbuhan PAD. Kemudian hasil perhitungan rasio disusun menjadi data panel untuk dilakukan analisis regresi data panel berupa Uji Chow untuk memilih model data panel apakah menggunakan *Common Effect* (CE) atau *Fixed Effect* (FE), Uji Hausman untuk memilih model data panel apakah menggunakan *Fixed Effect* (FE) atau *Random Effect* (RE), dan Uji Lagrange Multiplier untuk memilih model data panel apakah menggunakan *Random Effect* (RE) lebih baik dibandingkan dengan *Common Effect* (CE). Setelah melakukan pengujian tersebut, analisis regresi linear berganda dilakukan untuk memperkirakan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Uji t digunakan untuk menilai tingkat signifikansi serta dampak masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Selanjutnya, Uji F bertujuan untuk menentukan pengaruh signifikan semua variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Terakhir, Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur tingkat variabel independen dalam model regresi dapat menjelaskan variabel dependen.

Variabel di dalam penelitian ini terdiri dari Kinerja Keuangan Daerah sebagai variabel dependen (Y) serta rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi, rasio kemandirian, dan rasio pertumbuhan PAD sebagai variabel independen (X).

### Pengukuran Variabel

#### Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan daerah diukur dengan menggunakan rasio DDF (Derajat Desentralisasi Fiskal), yang merupakan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan total pendapatan daerah. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk perhitungan tersebut.

$$\text{Rasio DDF} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

### Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas PAD dihitung dari perbandingan antara realisasi dan anggaran PAD. Semakin tinggi nilainya, semakin baik kemampuan daerah dalam mencapai target pendapatannya. Angka rasio efektivitas dapat dikatakan efektif apabila rasio efektivitasnya >100%, efektif berimbang apabila rasio efektivitasnya =100%, dan tidak efektif apabila rasio efektivitasnya <100%. Rumus yang digunakan sebagai berikut.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Anggaran Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

### Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi dihitung dengan membandingkan biaya pemungutan terhadap realisasi pendapatan yang diterima. Nilai rasio di bawah 100% menunjukkan tingkat efisiensi yang baik. Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

### Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian keuangan daerah ditentukan dengan membandingkan total Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan keseluruhan pendapatan yang diterima dari transfer pemerintah pusat, provinsi, serta pinjaman daerah. Nilai rasio yang lebih tinggi mengindikasikan bahwa daerah tersebut memiliki kapasitas fiskal yang lebih mandiri. Kemandirian keuangan dibagi menjadi empat kategori tingkat: instruktif (0%–25%), konsultatif (>25%–50%), partisipatif (>50%–75%), dan delegatif (>75%–100%). Rumus yang digunakan sebagai berikut.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

### Rasio Pertumbuhan PAD

Rasio pertumbuhan mencerminkan pola yang dapat menunjukkan naik atau turunnya kinerja keuangan daerah. Nilai positif menandakan adanya kenaikan realisasi anggaran, sedangkan nilai negatif menunjukkan penurunan. Rumus perhitungannya sebagai berikut.

$$\text{Rasio Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{PAD tahun } t - \text{PAD tahun } (t - 1)}{\text{PAD tahun } (t - 1)} \times 100\%$$

Keterangan : PAD tahun t = Realisasi PAD tahun anggaran bersangkutan, PAD tahun (t-1) = Realisasi PAD yang diukur tahun sebelumnya

## HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Hasil pengolahan data panel yang mencakup perhitungan rasio efektivitas PAD, efisiensi, kemandirian, serta pertumbuhan PAD disajikan pada bagian ini. Selanjutnya, dilakukan estimasi menggunakan model regresi data panel dan regresi linear berganda, disertai dengan pengujian statistik berupa Uji t, Uji F, dan Koefisien Determinasi ( $R^2$ ). Penjelasan mendalam mengenai setiap hasil analisis disajikan pada uraian berikut.

### Analisis Rasio

#### Rasio Efektivitas PAD

Pada Tabel 1 diperoleh hasil rata-rata efektivitas PAD menunjukkan bahwa secara umum kinerja perolehan PAD berada dalam kategori efektif dengan rata-rata efektivitas PAD lebih dari 100%. Namun, terjadi fluktuasi antar tahun, efektivitas tertinggi tercatat pada tahun 2021, sedangkan yang terendah terjadi pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan tren kenaikan dalam dua tahun terakhir meskipun masih tergolong efektif.

Efektivitas PAD tertinggi selama tahun 2019—2023 diraih oleh Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Pekalongan, dan Kota Magelang. Tingginya efektivitas di beberapa daerah tersebut mencerminkan kemampuan dalam melampaui target perolehan PAD secara signifikan. Sebaliknya, efektivitas PAD terendah terjadi di Kota Tegal, Kabupaten Kendal, dan Kota Semarang. Hal ini menandakan bahwa realisasi PAD di beberapa pemerintah daerah masih kurang optimal dan belum mampu mencapai target yang telah direncanakan, sehingga termasuk dalam kategori tidak efektif.

Secara keseluruhan, meskipun sebagian besar daerah menunjukkan kinerja yang baik, namun masih terdapat ketimpangan antar kabupaten/kota dalam hal efektivitas PAD. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah daerah, terutama bagi daerah dengan efektivitas yang konsisten rendah, untuk mengevaluasi strategi perencanaan dan pengelolaan sumber-sumber PAD agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemungutan pendapatan di masa yang akan datang.

#### Rasio Efisiensi

Berdasarkan perhitungan rasio efisiensi pada Tabel 2, diperoleh hasil rata-rata rasio efisiensi PAD yang secara umum menunjukkan pengelolaan pendapatan daerah berada dalam kategori efisien. Namun, terjadi fluktuasi signifikan setiap tahunnya, terutama pada tahun 2020 yang mencerminkan efisiensi sangat tinggi. Penurunan

aktivitas ekonomi sebagai konsekuensi dari pandemi Covid-19 yang mengakibatkan berkurangnya biaya pemungutan secara signifikan.

Efisiensi PAD tertinggi selama tahun 2019—2023 dicapai oleh Kota Tegal, Kabupaten Batang, dan Kabupaten Klaten. Efisiensi yang sangat tinggi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah dapat menghasilkan PAD dengan biaya yang sangat minimal. Namun demikian, efisiensi ekstrem seperti ini juga perlu dikaji lebih lanjut apakah terjadi karena efisiensi nyata atau karena penurunan alokasi anggaran pemungutan selama masa pandemi Covid-19. Sebaliknya, efisiensi terendah terjadi pada Kota Salatiga, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Banjarnegara dengan rata-rata rasio di atas 100% yang menandakan bahwa biaya pemungutan PAD melebihi pendapatan yang berhasil dikumpulkan, sehingga sangat tidak efisien dan berpotensi membebani keuangan daerah. Ketidakefisienan ini menjadi perhatian khusus untuk melakukan evaluasi terhadap struktur biaya dan strategi pengumpulan PAD.

Secara keseluruhan, meskipun mayoritas daerah menunjukkan efisiensi yang cukup baik, adanya ketimpangan antar tahun dan antar daerah menunjukkan perlunya konsistensi dalam pengelolaan biaya pemungutan PAD. Efisiensi tinggi bukan hanya soal penghematan, tetapi juga terkait dengan kemampuan mempertahankan pendapatan daerah secara optimal dengan biaya yang rasional.

### **Rasio Kemandirian**

Berdasarkan Tabel 3, rata-rata rasio kemandirian menunjukkan bahwa sebagian besar daerah masih berada pada tingkat kemandirian yang rendah. Hal ini mencerminkan ketergantungan yang tinggi pada dana transfer pusat, serta menandakan bahwa kapasitas fiskal daerah belum optimal.

Kinerja rata-rata tertinggi dalam hal kemandirian fiskal diraih oleh Kota Semarang. Kemandirian yang tinggi menandakan bahwa Kota Semarang hampir sepenuhnya mampu membiayai pemerintahannya dari PAD tanpa banyak bergantung pada dana transfer pusat (delegatif). Sebaliknya, daerah dengan tingkat kemandirian terendah adalah Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Wonogiri. Nilai yang rendah menunjukkan bahwa PAD di daerah tersebut masih sangat kecil dibandingkan dana transfer, sehingga membuat ketergantungan fiskal kepada pemerintah pusat masih sangat tinggi (instruktif).

Temuan ini menandakan bahwa mayoritas pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah masih menghadapi tantangan guna mengoptimalkan potensi PAD, terutama yang berasal dari pajak daerah, retribusi, dan pemanfaatan aset milik daerah. Kondisi tersebut mencerminkan perlunya strategi yang lebih terarah dalam memperluas basis pendapatan lokal melalui intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi, serta perbaikan tata kelola keuangan daerah. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas fiskal dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer, sehingga mendorong terciptanya kemandirian fiskal daerah yang berkelanjutan.

### **Rasio Pertumbuhan PAD**

Berdasarkan perhitungan rasio pertumbuhan pada Tabel 4, diperoleh hasil rata-rata rasio pertumbuhan PAD yang mengalami peningkatan. Namun demikian, pertumbuhan tersebut bersifat fluktuatif antar tahun, dengan penurunan tajam pada tahun 2022 dikarenakan adanya pandemi Covid-19, sebelum kembali tumbuh pada tahun 2023.

Daerah dengan rata-rata pertumbuhan PAD tertinggi Kabupaten Blora, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Kudus. Capaian ini menunjukkan bahwa meskipun nilai PAD di daerah tersebut belum tentu besar secara absolut, namun kemampuannya untuk meningkatkan PAD dari tahun ke tahun relatif tinggi. Hal ini bisa mencerminkan adanya perluasan basis pajak, perbaikan sistem pemungutan, atau kebijakan fiskal daerah yang proaktif. Sebaliknya, pertumbuhan PAD terendah dialami oleh Kabupaten Klaten, Kabupaten Wonogiri, dan Kabupaten Pati. Pertumbuhan yang lambat menunjukkan perlunya evaluasi atas strategi peningkatan PAD di daerah-daerah tersebut. Terutama untuk mengantisipasi tekanan fiskal ke depan yang semakin besar akibat tuntutan otonomi daerah dan kebutuhan pelayanan publik yang meningkat.

Secara keseluruhan, variasi dalam rasio pertumbuhan PAD mengindikasikan bahwa ketahanan fiskal antar daerah belum merata. Dengan demikian penting bagi daerah dengan pertumbuhan rendah untuk melakukan optimalisasi potensi pendapatan dan memperkuat strategi intensifikasi serta ekstensifikasi sumber PAD.

### **Model Regresi Data Panel**

#### **Uji Chow**

Uji Chow diterapkan guna menetapkan model estimasi yang paling sesuai diantara *Common Effect Model* (CEM) dan *Fixed Effect Model* (FEM) untuk

menganalisis data panel. Proses pengujian ini melibatkan pemeriksaan nilai probabilitas dari *Cross-section F* dan *Chi-square*, yang bertujuan untuk menentukan apakah terdapat perbedaan signifikan di antara unit *cross-section dalam model yang digunakan*.

Tabel 5 yang menunjukkan hasil Uji Chow, diperoleh nilai probabilitas *Cross-section F* dan *Chi-square* sebesar 0,0000, yang lebih kecil dari batas signifikansi 5%. Hal ini menandakan bahwa terdapat perbedaan karakteristik yang signifikan antar kabupaten/kota, sehingga model *Common Effect* tidak lagi memadai untuk merepresentasikan keragaman data. *Fixed Effect Model* (FEM) ditetapkan sebagai pendekatan yang lebih tepat, karena mampu mengakomodasi perbedaan *intercept* masing-masing entitas secara akurat. Dengan mempertimbangkan heterogenitas antar daerah, penggunaan FEM dapat meningkatkan ketepatan estimasi regresi. Setelah pemilihan model ini, proses analisis dapat dilanjutkan ke tahap Uji Hausman guna menguji lebih lanjut kecocokan model panel yang digunakan.

### **Uji Hausman**

Uji Hausman dilakukan guna menetapkan model estimasi yang paling sesuai diantara *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM). Tujuan dari pengujian tersebut guna mengidentifikasi hubungan antara variabel independen dan efek individual (*cross-section effect*). Apabila terdeteksi adanya korelasi, maka FEM dianggap lebih sesuai karena dapat secara eksplisit menangkap heterogenitas di antara unit. Sebaliknya, jika tidak ada korelasi yang ditemukan, REM akan dipilih karena lebih efisien dalam proses estimasi.

Hasil Uji Hausman yang ditampilkan pada Tabel 6, didapatkan nilai probabilitas *Cross-section Random* sebesar 0,9637, yang jauh melebihi batas signifikansi 0,05. Hal tersebut menandakan tidak adanya perbedaan signifikan FEM dan REM, serta tidak ditemukan korelasi antara variabel bebas dan efek individual. Maka dalam analisis regresi data panel pada penelitian ini, *Random Effect Model* (REM) menjadi pendekatan yang paling tepat untuk digunakan. Setelah penetapan model, tahap berikutnya adalah melakukan Uji Lagrange Multiplier guna memperkuat validitas pemilihan model dan mendalami struktur *error* komponen dalam data panel.

### **Uji Lagrange Multiplier**

Uji Lagrange Multiplier dilakukan guna menentukan apakah model data panel sebaiknya menggunakan *Random Effect Model* (REM) ketika terdapat efek individual,

atau *Common Effect Model* (CEM) jika tidak ada efek tersebut. Uji ini membantu memastikan bahwa model estimasi yang dipilih sesuai dengan karakteristik variabel lintas individu dalam data.

Pada Tabel 7 yang menampilkan hasil Uji Lagrange Multiplier, didapatkan nilai *Probability Breusch Pagan* sebesar 0.0000, yang lebih kecil dari batas signifikansi 5%. Hal tersebut menandakan terdapat efek individual yang signifikan, sehingga REM lebih tepat digunakan daripada CEM. Maka dapat disimpulkan bahwa struktur data panel memiliki variabilitas yang signifikan antar entitas (kabupaten/kota), dan REM dapat menangkap variasi tersebut secara lebih efisien dibandingkan model regresi biasa. Estimasi regresi dan analisis hubungan antar variabel dalam penelitian ini akan dilanjutkan menggunakan REM sebagai pendekatan terbaik yang sesuai dengan karakteristik data panel.

#### **Analisis Regresi Linear Berganda dan Uji t**

Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, dilakukan regresi linear berganda dan uji t di dalam penelitian ini. Pendekatan ini digunakan karena mampu mengakomodasi lebih dari satu variabel bebas, sehingga analisis yang dihasilkan menjadi lebih komprehensif dalam menjelaskan hubungan antar variabel. Estimasi parameter dilakukan menggunakan metode *Random Effect Model* (REM), dengan hasil yang tersaji pada Tabel 8 dengan persamaan berikut.

$$Y = -1.422 + 0.015*X_1 + 0.078*X_2 + 0.443*X_3 + 0.016*X_4$$

Berdasarkan persamaan tersebut, seluruh variabel independen memiliki koefisien positif, yang menunjukkan bahwa peningkatan efektivitas, efisiensi, kemandirian, maupun pertumbuhan PAD akan berkontribusi pada peningkatan kinerja keuangan daerah.

Variabel yang memiliki pengaruh paling besar terhadap kinerja keuangan yaitu kemandirian daerah ( $X_3$ ), dengan koefisien regresi sebesar 0,443. Dapat diartikan setiap naik 1 satuan dalam rasio kemandirian, *ceteris paribus*, akan meningkatkan kinerja keuangan sebesar 0,443 satuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin mandiri suatu daerah secara fiskal, maka semakin baik pula kinerjanya dalam mengelola keuangan.

Sedangkan variabel lainnya seperti efektivitas PAD (0,015), efisiensi (0,078), dan pertumbuhan PAD (0,016) juga berpengaruh positif namun dengan besaran kontribusi

yang relatif kecil, menandakan bahwa meskipun berkontribusi, dampaknya tidak sebesar kemandirian daerah terhadap kinerja keuangan. Dengan demikian, kebijakan peningkatan kemandirian fiskal daerah merupakan faktor strategis yang perlu diperkuat untuk mendorong kinerja keuangan yang lebih optimal.

Secara parsial, hasil analisis pengaruh masing-masing variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) menunjukkan bahwa keempat variabel bebas, yaitu efektivitas PAD (X1), efisiensi (X2), kemandirian (X3), dan pertumbuhan PAD (X4) berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini dibuktikan dengan nilai probabilitas (*p-value*) seluruh variabel yang berada di bawah ambang batas signifikansi 5% (X1 = 0,0013; X2 = 0,0000; X3 = 0,0000; X4 = 0,0047). Dengan demikian, keempat variabel tersebut memiliki kontribusi nyata untuk menjelaskan variasi kinerja keuangan pemerintah daerah selama periode 2019–2023.

#### Uji F

Pada Tabel 8, hasil dari uji F menghasilkan nilai *F-statistic* sebesar 614,3463 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0000. Angka tersebut menandakan bahwa model regresi memiliki signifikansi secara simultan pada tingkat signifikansi 5%. Ini dapat berarti secara kolektif variabel independen yang terdapat dalam model memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Maka, bisa disimpulkan efektivitas PAD, efisiensi, kemandirian, dan pertumbuhan PAD secara bersamaan dapat mempengaruhi dan menjelaskan kinerja keuangan pemerintah daerah dengan signifikan.

Hasil tersebut menandakan upaya peningkatan pada keempat aspek tersebut secara menyeluruh akan memberikan kontribusi nyata terhadap perbaikan kinerja keuangan daerah. Hal ini juga memperkuat pentingnya strategi fiskal daerah yang terfokus tidak hanya pada satu aspek tertentu, tetapi juga mencakup integrasi antara efektivitas pengelolaan pendapatan, efisiensi belanja, peningkatan kemandirian fiskal, serta pertumbuhan pendapatan asli daerah yang berkelanjutan. Model regresi yang terbukti signifikan secara simultan ini dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan dalam optimalisasi keuangan daerah secara menyeluruh.

#### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Berdasarkan Tabel 8, hasil dari uji koefisien determinasi menghasilkan bahwa model ini mempunyai kemampuan yang sangat baik untuk menjelaskan variabel dependen yang tercermin dari nilai *R-squared* (0,935) yang menunjukkan bahwa 93,5%

variasi dalam kinerja keuangan dapat dijelaskan oleh variabel efektivitas PAD, efisiensi, kemandirian, dan pertumbuhan PAD. Dengan demikian, sebagian besar perubahan yang terjadi pada kinerja keuangan daerah dapat diatribusikan kepada keempat variabel independen yang dianalisis pada penelitian ini. Sementara itu, faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi yang tidak termasuk dalam model, seperti kondisi makroekonomi, regulasi dari pemerintah pusat, atau aspek manajerial di tingkat daerah sebesar 6,5%.

Tingginya nilai koefisien determinasi di dalam penelitian ini menandakan bahwa model regresi yang diterapkan sangat efektif dan relevan dalam menggambarkan hubungan antara indikator-indikator keuangan daerah dan kinerja fiskal yang dihasilkan. Hal ini juga mengindikasikan bahwa pemilihan variabel dalam penelitian telah tepat, karena mampu menjelaskan hampir seluruh variasi yang terjadi dalam variabel terikat. Selain itu, nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0,933 memperkuat hasil tersebut, karena tetap menunjukkan tingkat penjelasan yang tinggi meskipun telah dikoreksi untuk jumlah variabel dalam model.

Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas pengelolaan pendapatan asli daerah, efisiensi belanja publik, tingkat kemandirian fiskal, dan pertumbuhan PAD merupakan unsur-unsur yang sangat menentukan dalam pencapaian kinerja keuangan yang optimal. Oleh karena itu, strategi pengelolaan keuangan daerah yang berfokus pada penguatan keempat variabel tersebut dalam peningkatan kinerja keuangan dipercaya dapat memberikan dampak positif secara menyeluruh dan berkelanjutan.

## **Pembahasan**

### **Pengaruh Efektivitas PAD terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas PAD berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan. Temuan tersebut selaras dengan studi sebelumnya (Amal & Wibowo, 2022; Berizky & Kurniawan, 2024; Harahap, 2021; Hidayah & Witono, 2021; Perangin-Angin dkk., 2023; Setianingrum & Haryanto, 2020; Wellyan dkk., 2023; Widiyanto & Isnowati, 2023, 2023; Yanuar, 2023) yang menunjukkan pengaruh signifikan positif efektivitas PAD terhadap kinerja keuangan. Hal ini selaras dengan teori *stewardship*, yang memandang pemerintah daerah sebagai pengelola yang dipercaya oleh masyarakat untuk memaksimalkan potensi daerahnya.

Efektivitas PAD yang tinggi menggambarkan kemampuan pemerintah kabupaten dan kota dalam merealisasikan target pendapatan sesuai dengan potensi riilnya.

Berdasarkan data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2019–2023, sebagian besar pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Hal ini menandakan pengelolaan yang baik, di mana efektivitas PAD yang meningkat turut mendorong tingginya capaian realisasi anggaran. Kabupaten Sukoharjo, Kota Magelang, dan Kabupaten Sragen konsisten mencapai rasio efektivitas di atas 100% pada tahun 2019–2023, yang memperlihatkan bahwa realisasi PAD melebihi target yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut mencerminkan semakin kuatnya peran pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara efektif sehingga meningkatkan kepercayaan publik dan memperbaiki kinerja keuangan secara keseluruhan.

### **Pengaruh Efisiensi terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah**

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa efisiensi memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja keuangan. Temuan tersebut selaras dengan studi sebelumnya (Harahap, 2021; Wellyan dkk., 2023; Widiyanto & Isnowati, 2023) yang juga menemukan adanya hubungan positif dan signifikan antara efisiensi dan kinerja keuangan. Semakin rendah rasio efisiensi (yang artinya penggunaan anggaran semakin hemat), semakin baik pula kinerja yang dicapai.

Dalam praktiknya, data keuangan Jawa Tengah 2019–2023 menunjukkan beberapa daerah berhasil menekan rasio belanja dibandingkan pendapatan yang diperoleh. Kabupaten Wonogiri, mencatatkan penurunan rasio efisiensi di bawah 100% pada tahun 2019–2023, yang berarti belanja tidak melebihi penerimaan. Hal ini sejalan dengan prinsip teori *stewardship* yang menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya secara bertanggung jawab.

Secara nyata, laporan keuangan pemerintah daerah di Jawa Tengah memperlihatkan adanya tren perbaikan efisiensi pasca-pandemi, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan. Daerah yang menekan belanja tidak produktif sambil tetap mempertahankan layanan publik menunjukkan capaian efisiensi yang berdampak langsung pada peningkatan kinerja keuangannya

### **Pengaruh Kemandirian terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah**

Berdasarkan hasil penelitian mengindikasikan bahwa kemandirian berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan. Temuan tersebut selaras dengan studi sebelumnya (Amal & Wibowo, 2022; Berizky & Kurniawan, 2024; Harahap, 2021; Wellyan dkk., 2023; Widiyanto & Isnowati, 2023) yang menunjukkan pengaruh signifikan positif kemandirian terhadap kinerja keuangan. Semakin mandiri suatu daerah dalam memperoleh dan memanfaatkan PAD, semakin kuat pula posisinya dalam mengelola pembangunan tanpa ketergantungan yang besar pada dana perimbangan.

Kondisi riil di Jawa Tengah memperlihatkan bahwa beberapa kota seperti Kota Magelang dan Kota Semarang memiliki rasio kemandirian yang tinggi karena kontribusi PAD mereka dominan dibanding dana transfer pusat. Dalam rentang 2019–2023, Kota Semarang tercatat beberapa kali mencapai kemandirian fiskal di atas 75%, yang artinya hampir seluruh kebutuhan pembiayaan daerah ditopang oleh PAD. Pencapaian tersebut menunjukkan implementasi teori *stewardship*, yaitu pemerintah daerah bertindak sebagai pengelola yang bertanggung jawab dengan memaksimalkan potensi lokalnya. Semakin mandiri suatu daerah, maka semakin baik kinerja keuangan yang terlihat dari indikator rasio-rasio keuangan yang lebih sehat.

### **Pengaruh Pertumbuhan PAD terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah**

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan PAD memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja keuangan. Temuan tersebut selaras dengan studi sebelumnya (Setianingrum & Haryanto, 2020) yang juga membuktikan adanya hubungan positif dan signifikan antara pertumbuhan PAD dengan kinerja keuangan. Pertumbuhan yang positif menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperluas basis pajak dan retribusi, serta menandakan peningkatan aktivitas ekonomi lokal.

Dalam periode 2019–2023, beberapa daerah di Jawa Tengah mengalami peningkatan PAD yang cukup konsisten, meskipun sempat tertekan pada masa pandemi 2020. Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan mencatat pertumbuhan PAD rata-rata pertahun 6–8% dalam periode 2019–2023, yang kemudian berdampak pada kemampuan daerah tersebut untuk meningkatkan belanja pembangunan dan pelayanan

publik. Kinerja keuangan yang membaik ini mendukung pandangan teori *stewardship* bahwa pengelola publik akan berupaya mengoptimalkan sumber daya untuk kepentingan pemangku kepentingan, sehingga pertumbuhan PAD menjadi indikator penting dalam mengukur keberhasilan pengelolaan keuangan daerah.

### KESIMPULAN

Kesimpulan berdasarkan hasil analisis, bahwa rasio efektivitas telah berada pada tingkat efektif, sementara rasio efisiensi menunjukkan pola yang berfluktuasi namun tetap berada dalam kategori efisien. Rasio kemandirian daerah masih berada pada pola hubungan instruktif yang mencerminkan kemampuan keuangan daerah yang relatif rendah, sedangkan rasio pertumbuhan PAD memperlihatkan tren peningkatan dari tahun 2019 hingga 2023. Gambaran tersebut menandakan bahwa secara umum pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah telah mampu mengelola potensi keuangannya dengan cukup baik meskipun masih terdapat tantangan pada aspek kemandirian fiskal.

Penerapan model regresi data panel dengan pendekatan *Random Effect Model* (REM) memperlihatkan bahwa rasio efektivitas PAD, efisiensi, kemandirian, dan pertumbuhan PAD berpengaruh signifikan secara parsial maupun simultan terhadap kinerja keuangan daerah. Nilai koefisien determinasi yang mencapai 93,5% mengindikasikan bahwa model ini dalam menjelaskan variasi kinerja keuangan memiliki kemampuan yang kuat. Artinya, sebagian besar perubahan dalam kinerja keuangan dapat dipahami melalui variabel-variabel tersebut, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang belum terakomodasi dalam penelitian ini.

Keterbatasan yang ada di dalam penelitian ini, yaitu waktu karena hanya menggunakan data hingga tahun 2023, mengingat laporan audit tahun 2024 belum diterbitkan oleh BPK. Meskipun demikian, temuan yang diperoleh memberikan arahan praktis bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan efektivitas PAD, efisiensi pengelolaan anggaran, kemandirian fiskal, dan pertumbuhan PAD yang berkesinambungan. Perbaikan berkelanjutan di keempat aspek tersebut diyakini dapat mendorong kinerja keuangan yang lebih sehat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung percepatan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Jawa Tengah.

---

DAFTAR PUSTAKA

- Amal, M. I., & Wibowo, P. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sebelum Dan Sesudah Pandemi Covid-19. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1), 83–93. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1.1723>
- Arifin, Z., & Faisal, A. (2016). Penerapan Good Corporate Governance dan Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 20(1), 79–90.
- Armiyani, A., Trisetyasi, E., Samiu, L. D., & Ibrahim, S. M. (2022). Analisis Kinerja Keuangan dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Badan Keuangan & Aset Daerah Kota Kendari. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 4(3), Article 3. <https://doi.org/10.37531/sejaman.v5i2.3200>
- Berizky, K. G., & Kurniawan, R. (2024). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019-2022. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(1), 246–259. <https://doi.org/10.31955/mea.v8i1.3662>
- Cristiana, I., & Maryono, M. (2016). Faktor-Faktor Penentu Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia. *Dinamika Akuntansi Keuangan Dan Perbankan*, 5(2), Article 2. <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe9/article/view/5938>
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49–64. <https://doi.org/10.1177/031289629101600103>
- Ernawati, E., & Jaeni, J. (2018). Faktor Penentu Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah Tahun 2015-2017). *Dinamika Akuntansi Keuangan Dan Perbankan*, 7(1), Article 1. <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe9/article/view/7447>
- Halim, A. (2012). *Akuntansi sektor publik: Akuntansi Keuangan Daerah* (4 ed.). Salemba Empat.
- Harahap, E. J. (2021). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara)* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara]. <http://repository.uinsu.ac.id/12246/>
- Hidayah, Z., & Witono, B. (2021). *Analisis Rasio Keuangan Daerah Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019* [S1, Universitas Muhammadiyah Surakarta]. <https://eprints.ums.ac.id/96197/>
- Isnowati, S., & Masdjojo, G. N. (2024). Analisis Kinerja Pendapatan Daerah dan Kemandirian Daerah pada Masa Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(3), 113–126. <https://doi.org/10.31955/mea.v8i3.4408>
- Jaeni, J., & Anggana L, G. (2016). Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Pemoderasi Pendapatan Asli Daerah dan Bantuan Propinsi terhadap Belanja Modal. *Dinamika Akuntansi Keuangan Dan Perbankan*, 5(1), Article 1. <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe9/article/view/5569>
- Kusumaningtyas, E., Sugiyanto, Subagyo, E., Adinugroho, W. C., Jacob, J., Yunikke Berry, Ani Nuraeni, Sudjono, & Silvana Syah. (2022). *Konsep dan Praktik Ekonometrika menggunakan EViews* (E-Book). Academia Publication.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (Keempat). UPP STIM YKPN.

- Mushonifin, M. H. (2021, Mei 2). *BPK Jateng Beri Catatan Permasalahan Keuangan Pada Tiga Daerah Ini—SigiJateng.id*. BPK Jateng Beri Catatan Permasalahan Keuangan Pada Tiga Daerah Ini - SigiJateng.id. <https://www.sigijateng.id/pemerintahan/150619720/bpk-jateng-beri-catatan-permasalahan-keuangan-pada-tiga-daerah-ini>
- Ningsih, K. S., Frinaldi, A., & Magriasti, L. (2023). Desentralisasi Fiskal Dalam Peyelenggaraan Otonomi Daerah Di Indonesia. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 7(3), Article 3. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i3.5389>
- Nurhayati, N. (2015). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu. *Cano Ekonomos*, 4(1), 55–66.
- Perangin-Angin, P. G. B., Natalian, E. A., & Bharata, R. W. (2023). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019-2022. *Manajemen Kreatif Jurnal*, 1(3), 173–183. <https://doi.org/10.55606/makreju.v1i3.1657>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (2020).
- Setianingrum, R. D., & Haryanto, H. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah. *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(2), Article 2. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/27592>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (2022).
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (2004).
- Wellyan, V. R., Novaria, E., & Lisdiana, L. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. *KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan*, 3(3), 216–232. <https://doi.org/10.51878/knowledge.v3i3.2456>
- Widiyanto, P. P., & Isnowati, S. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 6(2.1), Article 2.1. <https://doi.org/10.37531/sejaman.v6i2.5426>
- Yanuar, A. (2023). *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2017-2021* [Other, UPN “Veteran” Yogyakarta]. <http://eprints.upnyk.ac.id/36365/>

## TABEL

Tabel 1 Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas

No.	Kota/Kabupaten	Rasio Efektivitas (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Kabupaten Banyumas	103,84	105,51	107,30	95,20	98,21
2	Kabupaten Batang	98,65	113,92	117,84	106,85	105,59
3	Kabupaten Blora	113,21	108,01	124,60	103,67	110,09
4	Kabupaten Boyolali	108,48	103,48	134,06	109,55	106,46
5	Kabupaten Brebes	99,25	108,10	107,70	97,82	97,54
6	Kabupaten Cilacap	103,68	105,39	113,13	101,43	102,82
7	Kabupaten Demak	107,94	119,48	109,81	105,25	110,04
8	Kabupaten Grobogan	102,12	112,66	122,36	115,85	108,62
9	Kabupaten Jepara	103,29	102,78	109,56	98,76	94,95
10	Kabupaten Karanganyar	110,03	112,57	99,85	116,74	108,74

11	Kabupaten Kebumen	100,53	123,32	118,31	116,33	107,55
12	Kabupaten Kendal	84,97	106,92	105,69	82,61	102,93
13	Kabupaten Klaten	106,49	133,83	113,45	108,79	103,87
14	Kabupaten Kudus	102,58	131,63	138,00	103,23	106,05
15	Kabupaten Magelang	94,52	124,21	103,71	107,41	104,92
16	Kabupaten Pati	99,37	98,99	115,47	106,91	117,13
17	Kabupaten Pekalongan	83,66	90,26	102,03	80,96	250,85
18	Kabupaten Pemalang	117,98	112,20	118,95	100,98	90,82
19	Kabupaten Purbalingga	108,20	122,28	130,39	108,44	108,01
20	Kabupaten Purworejo	95,22	116,34	143,81	91,43	96,20
21	Kabupaten Rembang	99,31	111,82	114,33	94,37	88,25
22	Kabupaten Semarang	105,40	111,13	140,57	98,32	99,22
23	Kabupaten Sragen	108,42	127,40	137,07	102,88	106,31
24	Kabupaten Sukoharjo	127,54	137,00	125,61	125,77	118,48
25	Kabupaten Tegal	96,90	107,61	125,81	111,78	96,99
26	Kabupaten Temanggung	106,85	122,03	133,62	100,90	112,48
27	Kabupaten Wonogiri	109,79	119,00	115,14	113,58	108,21
28	Kabupaten Wonosobo	104,81	120,64	142,71	112,17	97,35
29	Kabupaten Banjarnegara	104,34	100,92	106,27	98,75	102,37
30	Kota Magelang	112,86	120,94	126,83	115,62	105,94
31	Kota Pekalongan	101,53	132,88	117,66	102,99	105,16
32	Kota Salatiga	106,78	111,01	118,23	110,21	113,43
33	Kota Semarang	97,09	107,14	91,50	100,49	98,30
34	Kota Surakarta	96,17	122,32	109,02	87,48	87,84
35	Kota Tegal	93,16	96,43	97,05	89,02	80,84
	Rata-Rata	103,28	114,29	118,21	103,50	107,22

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran, diolah

Tabel 2 Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi

No.	Kota/Kabupaten	Rasio Efisiensi (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Kabupaten Banyumas	81,54	80,67	98,37	105,09	100,07
2	Kabupaten Batang	80,85	77,87	97,73	102,91	79,26
3	Kabupaten Blora	97,98	98,76	94,91	110,08	97,18
4	Kabupaten Boyolali	84,75	82,80	93,35	104,19	99,57
5	Kabupaten Brebes	79,80	75,13	98,86	103,39	97,20
6	Kabupaten Cilacap	84,68	82,72	99,87	103,31	100,71
7	Kabupaten Demak	80,42	79,24	98,76	103,52	83,98
8	Kabupaten Grobogan	82,56	82,67	92,17	103,80	100,02
9	Kabupaten Jepara	79,75	82,20	97,01	104,40	103,77
10	Kabupaten Karanganyar	87,36	82,52	98,75	97,86	101,94
11	Kabupaten Kebumen	79,71	77,39	98,16	99,20	104,44
12	Kabupaten Kendal	87,84	77,23	89,98	110,31	100,90
13	Kabupaten Klaten	71,31	70,61	97,02	97,68	107,38
14	Kabupaten Kudus	86,32	81,55	87,81	107,35	104,77
15	Kabupaten Magelang	73,18	68,75	97,71	100,48	104,44
16	Kabupaten Pati	75,97	77,49	96,28	100,47	97,81
17	Kabupaten Pekalongan	82,08	80,78	99,83	102,38	99,11
18	Kabupaten Pemalang	79,74	89,21	96,91	100,43	98,72
19	Kabupaten Purbalingga	81,93	76,84	97,33	104,94	100,10
20	Kabupaten Purworejo	77,40	73,77	93,24	107,37	101,18

21	Kabupaten Rembang	80,35	75,91	96,08	108,16	101,78
22	Kabupaten Semarang	85,99	84,15	90,96	108,51	101,26
23	Kabupaten Sragen	74,95	80,65	92,47	105,90	108,74
24	Kabupaten Sukoharjo	82,85	84,68	98,58	101,35	103,45
25	Kabupaten Tegal	80,21	75,83	97,00	99,21	101,18
26	Kabupaten Temanggung	77,73	74,66	95,28	103,34	101,92
27	Kabupaten Wonogiri	85,26	83,68	99,74	99,16	98,71
28	Kabupaten Wonosobo	87,50	81,79	94,53	104,68	102,37
29	Kabupaten Banjarnegara	100,81	101,80	97,89	99,74	101,00
30	Kota Magelang	102,77	84,38	94,03	105,45	100,70
31	Kota Pekalongan	98,15	99,13	99,56	104,25	100,33
32	Kota Salatiga	101,51	106,07	101,09	101,49	102,79
33	Kota Semarang	101,48	93,77	98,78	98,04	99,77
34	Kota Surakarta	81,93	89,48	96,25	102,95	105,94
35	Kota Tegal	100,86	102,95	105,70	108,16	15,86
Rata-Rata		85,07	83,35	96,63	103,42	97,95

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran, diolah

Tabel 3 Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian

No.	Kota/Kabupaten	Rasio Kemandirian (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Kabupaten Banyumas	35,40	36,04	30,05	31,77	32,48
2	Kabupaten Batang	22,53	25,52	22,74	20,77	22,16
3	Kabupaten Blora	15,13	20,44	18,01	17,61	17,41
4	Kabupaten Boyolali	21,12	24,59	28,21	23,36	25,45
5	Kabupaten Brebes	18,00	20,35	21,11	16,40	18,60
6	Kabupaten Cilacap	22,81	25,20	30,75	27,32	28,63
7	Kabupaten Demak	22,08	29,43	24,81	24,93	26,80
8	Kabupaten Grobogan	18,59	20,07	20,60	19,75	19,46
9	Kabupaten Jepara	20,06	23,39	21,97	22,54	23,57
10	Kabupaten Karanganyar	22,72	23,56	25,86	29,55	24,45
11	Kabupaten Kebumen	18,01	18,13	21,24	21,99	22,28
12	Kabupaten Kendal	19,71	21,38	25,05	24,07	28,61
13	Kabupaten Klaten	16,52	18,83	14,80	16,17	14,62
14	Kabupaten Kudus	20,51	24,57	31,98	25,25	28,34
15	Kabupaten Magelang	20,22	17,00	18,93	20,60	22,28
16	Kabupaten Pati	19,14	17,10	17,52	17,01	19,04
17	Kabupaten Pekalongan	19,51	25,17	21,20	19,93	34,50
18	Kabupaten Pemalang	16,44	16,77	17,60	16,28	16,46
19	Kabupaten Purbalingga	18,28	20,38	24,07	17,99	19,88
20	Kabupaten Purworejo	15,49	17,15	24,73	17,87	20,26
21	Kabupaten Rembang	21,32	22,07	28,14	23,77	22,05
22	Kabupaten Semarang	25,23	25,02	33,17	25,86	28,45
23	Kabupaten Sragen	19,91	22,81	31,41	20,16	21,45
24	Kabupaten Sukoharjo	31,30	34,76	34,75	32,67	33,11
25	Kabupaten Tegal	23,73	25,91	27,91	24,07	24,60

26	Kabupaten Temanggung	18,19	21,18	23,61	19,47	21,18
27	Kabupaten Wonogiri	13,95	14,54	12,52	17,27	12,98
28	Kabupaten Wonosobo	17,28	17,02	22,66	16,42	15,34
29	Kabupaten Banjarnegara	14,69	14,48	18,86	16,42	18,64
30	Kota Magelang	40,55	45,77	48,60	62,08	47,33
31	Kota Pekalongan	28,96	32,80	36,70	36,31	34,50
32	Kota Salatiga	35,09	33,71	43,39	35,57	40,50
33	Kota Semarang	86,61	90,77	102,82	105,07	112,61
34	Kota Surakarta	18,28	33,85	42,43	47,05	52,83
35	Kota Tegal	39,48	37,00	44,52	48,40	5,22
Rata-Rata		23,91	26,19	28,93	27,48	27,32

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran, diolah

Tabel 4 Hasil Perhitungan Rasio Pertumbuhan

No.	Kota/Kabupaten	Rasio Pertumbuhan PAD (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Kabupaten Banyumas	5,94	-2,71	14,03	7,97	3,92
2	Kabupaten Batang	3,49	4,71	25,39	-6,76	8,91
3	Kabupaten Blora	21,50	21,40	19,95	-0,25	10,28
4	Kabupaten Boyolali	15,30	14,19	14,05	-13,65	11,19
5	Kabupaten Brebes	9,28	3,55	32,09	-19,12	14,44
6	Kabupaten Cilacap	8,85	2,97	24,99	-5,24	9,74
7	Kabupaten Demak	19,01	7,93	1,21	7,23	6,48
8	Kabupaten Grobogan	9,13	1,71	21,04	0,13	1,91
9	Kabupaten Jepara	4,24	8,93	-2,56	4,62	4,35
10	Kabupaten Karanganyar	13,00	-0,79	6,23	4,62	4,35
11	Kabupaten Kebumen	16,22	-1,50	17,12	8,54	-9,15
12	Kabupaten Kendal	4,35	1,78	23,11	-0,30	24,21
13	Kabupaten Klaten	-21,28	5,88	-4,44	13,56	-5,29
14	Kabupaten Kudus	1,91	11,65	32,11	-17,44	19,98
15	Kabupaten Magelang	28,33	-20,95	13,83	15,27	7,58
16	Kabupaten Pati	-5,22	2,12	4,56	0,03	13,44
17	Kabupaten Pekalongan	9,66	0,16	1,37	-1,05	12,10
18	Kabupaten Pemasang	16,67	-6,33	11,27	-4,45	4,15
19	Kabupaten Purbalingga	8,25	2,49	20,49	-18,97	11,40
20	Kabupaten Purworejo	-2,29	8,70	43,79	-24,64	15,04
21	Kabupaten Rembang	3,97	5,91	23,70	-12,62	-3,14
22	Kabupaten Semarang	11,87	3,15	30,10	-16,58	10,38
23	Kabupaten Sragen	10,18	7,10	36,20	-32,16	11,39
24	Kabupaten Sukoharjo	5,83	2,35	12,53	-6,26	8,44
25	Kabupaten Tegal	17,12	0,90	34,34	-10,13	4,18
26	Kabupaten Temanggung	10,43	10,48	18,10	-14,99	13,47
27	Kabupaten Wonogiri	6,76	-4,50	-12,03	37,92	-13,50
28	Kabupaten Wonosobo	5,09	5,60	34,97	-22,02	0,80
29	Kabupaten Banjarnegara	9,20	-7,40	31,51	-9,34	17,92
30	Kota Magelang	9,49	6,28	9,85	18,15	-13,96

31	Kota Pekalongan	18,72	8,03	9,64	4,54	-0,05
32	Kota Salatiga	13,00	-7,01	18,89	-14,15	18,08
33	Kota Semarang	13,46	-2,02	17,85	6,71	11,36
34	Kota Surakarta	3,98	-9,75	13,76	15,49	6,16
35	Kota Tegal	3,84	-6,65	15,58	10,37	-0,94
Rata-Rata		8,84	2,24	17,56	-2,71	6,85

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran, diolah

Tabel 5 Uji Chow

Tes Efek	Statistik	d.f.	Probabilitas
Cross-section F	12.147688	(34,136)	0.0000
Cross-section Chi-square	244.209445	34	0.0000

Sumber : Data Peneliti, 2025

Tabel 6 Uji Hausman

Hasil Tes	Chi-Sq. Statistik	Chi-Sq. d.f.	Probabilitas
Cross-section random	0.593945	4	0.9637

Sumber : Data Peneliti, 2025

Tabel 7 Uji Lagrange Multiplier

	Tes Hipotesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	165.8035 (0.0000)	0.189557 (0.6633)	165.9930 (0.0000)

Sumber : Data Peneliti, 2025

Tabel 8 Random Effect Model (REM)

Variabel	Koefisien	t-Statistik	Probabilitas
C	-1.421598	-1.817874	0.0708
X1	0.015245	3.259396	0.0013
X2	0.077690	12.65105	0.0000
X3	0.442510	36.53544	0.0000
X4	0.016227	2.865109	0.0047
Weighted Statistics			
R-squared	0.935297		
Adjusted R-squared	0.933774		
F-statistic	614.3463		
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Data Peneliti, 2025